

## DAFTAR PUSTAKA

- Anike Tance Hendrika Sabami,"*Pengaruh Ideologi Gender Terhadap Citra Perempuan Asli Papua dalam Berpolitik*"Imprint BPK Gunung Mulia, Kwitang Jakarta 2002. Hal.34
- Ciputra Iha, "Evaluasi pelaksanaan otonomi Khusus di distrik Kayuni Kabupaten Fak – Fak Provinsi Papua Barat" *Jurnal artikel Politik* 2017.
- Dr.H.Encup Supriatna,M.S.i "*Perekembangan Politik dan Sistem Birokrasi di Beberapa Negara*" Pustaka Setia Bandung 2015.,Hal.35
- Dr.H.Muhamad Ridha Suib, S.E.,M.Si.,M.M.,M.H.,"*Pengantar Kebijakan Publik dari Administrasi Negara, Administrasi Publik, Pelayanan Publik, Good Governance,Hingga Implementasi Kebijakan*".,Caplus 2016.Hal.80-83
- Dr. Demmy Antoh,"*Rekonstruksi Transformasi Nasionalisme Papua*",Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2017.Hal,155-156
- Drs. Syakrani,MS dan Dr. Syahrani,Msi."*Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance*", Pustaka Panjar 2009
- Forum akademis untuk Papua, "*Gagasan Papua Damai*" Impersial 2012.Hal.169
- Haryanto, Haryanto. "Elit Politik Lokal dalam Perubahan Sistem Politik." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 13.2 (2009): 131-148.
- Hilmy Monther,*Demokrasi dan politik di kota santri*, Malang UB Press,2011, 144-145
- Hammar, Roberth Kurniawan Ruslak. "*perkembangan peraturan penataan ruang di indonesia dan di kabupaten manokwari papua barat.*" patriot (2010)
- Indonesia, Republik. "*Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.*" Lembaran Negara RI Tahun 68 (2007).
- Indonesia, Pemerintah Republik, dan PERUBAHAN KEDUA ATAS. "*Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.*" Lembaran Negara RI Tahun (2001).
- Jo Santoso.*Orang Asli Papua yang terasing di tanahnya sendiri*. Kompas Jakarta 2009.
- Krinus Kum. *Konflik pemakaran wilayah di Papua*.Buku Litera Yogyakarta 2013.Hal.15
- Lay, Cornelis. "Otonomi daerah dan keindonesiaan." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 5.2 (2001): 139-162.
- Lopulalan, Joseph Eliza. "Jati diri orang asli papua dalam pusaran otonomi khusus di Provinsi Papua Barat." *Jurnal Ilmu Sosial* 15.1 (2018).
- Munawar Noor "Pemberdayaan Masyarakat" *Jurnal Imiah Civis* ,Vol.1,No.2. Juli 2011.Hal. 98
- Nomor, Undang-Undang. "*Tahun 2002 tentang Partai Politik) diberlakukan sejak 27 Desember 2002.*" Undang-undang ini merupakan pengganti dari UU 2 (1999).

Undang-Undang UU No. 31/2002. "*Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.*" Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Nico Gere,"*Merawat Kedaulatan Indonesia di Papua*".Antara Kantor Berita Indonesia 2017.Hal.214

Otto Syamsuddin Ishak, Mestika Zed, Muchamad Ali Syafa'at,AIarif dan Gufron Mabuburi. "*Oase Gagasan Papua Damai*".Impersial 2012.Hal,37

Rangkuti, Afifa, and Putri Eka Ramadhani. "*Kebijakan Sistem Pendidikan di Kabupaten Aceh Tengah*" Ditinjau Dari Undang-Undang dan Fiqih Siyasah." (2021).

Suryawan, I. Ngurah. "*Antropologi gerakan sosial: Membaca transformasi identitas budaya di Kota Manokwari, Papua Barat.*" Humaniora 23.3 (2011): 290-300.

Singarimbun, Masri, and Sofian Effendi. "*Metode penelitian survai.*" (1982).

Surbakti, Ramlan, Didik Supriyanto, and Hasyim Asy'ari. "*Meningkatkan Keterwakilan Perempuan: Penguatan Kebijakan Afirmasi.*" (2011).

Suparto, Suparto. "*Otonomi Daerah di Indonesia: Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip dan Urgensinya.*" (2017): 72-93.

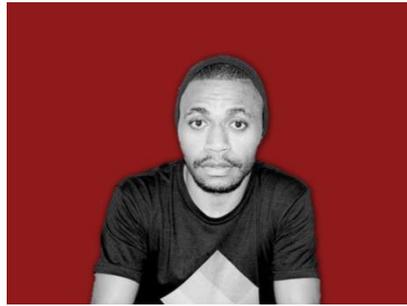
Safa'at, Muchamad Ali. "*Problem Otonomi Khusus Papua.*" (2012).

Sjafrisal, "*Perencanaan Pembangunan Daerah di Era Otonomi*". PT Rajagrafindo Persada.2016.Hal. 13

Suzann Kaler, "Penguasa dan kelompok elit", Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 1995 , *Jurnal Politik Muda, Vol.4., Januari 2014. Hal.41*



## BIO DATA PENULIS



Nama : Abia Indou

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Tempat Tanggal Lahir : Minyambou, 03 April 1991

Agama : Kristen Protestan

Pendidikan Forma : 1. SD YPPGI Minyambou  
2. SMP Negeri Minyambou  
3. SMK Negeri 01 Manokwari Papua Barat  
4. Universitas Nasional

Email : [abiaindou1991@gmail.com](mailto:abiaindou1991@gmail.com)

Pengalaman Organisasi : 1. Ketua HIPMAPABAR 2012 – 2015  
2. Dewan Penasehat HIMAPHAJ Jakarta  
3. Dewan Penasehat HIPMAJA Jakarta  
4. Kadiv Politik HIMAJIP UNAS 2018  
5. Sekjen DPK GMNI UNAS 2019  
6. Wakabid GMNI Jakarta Sselatan 2021

Alamat : Jln Ketapang No.8 Jati Padang Pasar Minggu  
Jakarta Selatan

## Lampiran 1. Hasil Wawancara

No	Responden	Pertanyaan	Jawaban
1	Hermus Indou S.Ip.,MH	<p>1. Apa upaya pemerintah Kabupaten Manokwari untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Manokwari Berdasarkan Aamanat Undang – Undang Otsus Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2)?</p> <p>2. Untuk menunjang aktifitas perekonomian orang asli di Papua, apa yang</p>	<p>Yang di lakukan pertama dalam masa pemerintahan saya, yang di lakukan adalah reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Manokwari, reormasi birokrasi ini bertujuan agar setiap OPD yang ada di Kabupaten Manokwari bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Manokwari khususnya Orang Asli Papua. Yang kedua, terkait dengan aktifitas pereekonomian di Kabupaten Manokwari, tentunya pemerintah daerah akan membangun Kembali beberapa pasar yang ada di Kabupaten Manokwari salah satunya adalah Pasar Wosi. Pasar Wosi sekarang sudah dalam tahap perencanaan dan di harapkan tahun 2023 Pasar Wosi segera di bangun dan di selesaikan pada tahun 2024.</p> <p>Yang sudah di kerjakan oleh pemerintah daerah adakah penyediaan lapak khusus mama – mama Papua walaupun tidak di manfaatkan secara maksmal, pemerintah daerah juga sudah berupaya untuk memberikan lapak – lapak bagi Orang Asli</p>

		<p>sudah di kerjakan oleh pemerintah daerah Manokwari dan apa yang sedang di upayakan?</p>	<p>Papua di Pasar Wosi dan Pasar sanggeng sebanyak 60% dari setiap lapak yang ada baik di Pasar Wosi maupun Pasar Sanggeng. Hanya saja Pemerintah Daerah mengalami kendala dalam merelokasi para pedagang yang masih mau bertahan di lapak – lapak yang sekarang sedang di manfaatkan untuk berjualan hasil panen. Yang sedang di kerjakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari adalah menindak tegas para oknum yang terlibat dalam aktifitas jual beli lapak di Pasar Wosi sebanyak 8 orang yang terdiri dri 5 warga pendatang dan 3 warga asli Manokwari, selain itu, Pemkab Manokwari juga telah menertibkan beberapa bangunan liar di luar Pasar wosi yang menghambat aktifitas pereekonomian agar alur transportasi di lingkungan Pasar dan Termina Wosi bisa berjalan secara benar. Dan yang ke depannya pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari akan membangun Pasar Wosi dan Pasar Sanggeng dengan status bukan lagi pasar Tradisiona.</p>
2	<p>Maksi Nelson Ahoren ( Ketua MRPB )</p>	<p>1. Bagaimana MRPB menampung aspirasi</p>	<p>1. Untuk menjaga keseimbangan antara aspirasi masyarakat asli Papua sesuai dengan amanat konstitusi yaitu melibatkan semua elemen perwakilan adat, agama dan</p>

		<p>masyarakat Papua yang berbeda sesuai dengan UU No.21 Tahun 2001 Pasal 23</p> <p>2. Bagaimana pengamatan Bapak tentang fenomena yang konflik yang terjadi di Papua Barat yang di sebabkan oleh kurang berkembangnya OAP dalam persaingan warga pendatang di Provinsi Papua Barat terkkhususnya di</p>	<p>perempuan bagaimana menyikapi suatu fenomena yang ada terkhususnya mengenai pemberdayaan orang asli Papua dalam semua sektor tidak hanya sektor perekonomian dan perdagangan sesuai dengan weweng MRPB yaitu memberi saran, memberi pertimbangan dan menyalurkan aspirasi masyarakat adat.</p> <p>2. Salah satu kelemahan dalam Undang – Undang Otsus adalah MRPB tidak memiliki kewenangan dalam mengelolah anggaran atau Dana Otsus yang di khususkan buat Pemberdayaan orang asli Papua melalui Pendidikan, kesehatan dan ekonomi. MRPB hanya menggunakan kewenangan untuk memberi saran kepada pemerintah tentang alokasi dan penggunaan anggaran yang di khususkan untuk orang asli Papua, bukan hanya di Kabupaten Manokwari, namun di 12 Kabupaten dan 1 Kota yang masuk dalam wilayah adminstrasi Papua Barat. Namun yang terjadi adalah pemerintah daerah Provinsi Maupun Kabupaten salah dalam mengelolah dana Otsus. Yang sering</p>
--	--	---	--

		<p>Manokwari sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Barat</p> <p>3. Salah satu amanat UU Otsus adalah penghormatan terhadap harkat dan Martabat OAP, salah satu unsur yaitu melalui Perdagangan di beberapa pusat belanja yang ada di Manokwari yaitu pasar Wosi, Pasar Sanggeng dan Pasar Borobudur yang sangat memprihatinkan. Bahkan mama –</p>	<p>terjadi di Papua Barat adalah dana otsus di pakai juga untuk membangun infrastruktur, yang mana itu sudah menjadi program umum bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan menggunakan APBN atau APBD.</p> <p>3. Sangat memprihatinkan kondisi pasar maupun kondisi mama – mama yang berjualan di pinggir jalan dengan beralaskan karung atau kain bahkan kertas koran. Kondisi tersebut menunjukan kepada masyarakat luas bahwa Otonomi khusus di Papua Barat telah gagal dalam mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua terkhususnya mama – mama Papua yang menjual hasil buminya di tempat yang tidak layak, selain itu hal itu terjadi karena pemerintah daerah kurang efektif dalam menjalankan amat UU Otusus di Papua Barat terkhususnya di Kabupaten Manokwari, anggaran yang sebenarnya di khususkan buat hal – hal yang berhubungan denga OAP di gunakan untuk membangun fasilitas umum, hingga saat ini MRPB selalu memberikan masukan</p>
--	--	---	---

		<p>Mama Papua haus berjalan dengan beralaskan karung di emperan toko dan pinggiran jalan?</p>	<p>bagi pemerintah Provinsi PB untuk membangun swalayan khusus untuk mama – mama Papua namun hingga detik inipun belum di lakukan oleh pemerintah daerah</p>
3	<p>Ibu Yuliana Numberi ( Aktivistis Perempuan dan Mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Manokwari</p>	<p>1. Otonomi Khusus bagi Papua dan Papua Barat sudah di perpanjang, walaupun sebelumnya banyak yang menolak Otsus jilid 2 karena di anggan gagal dalam mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua.</p>	<p>1. Tentunya masyarakat Papua ada yang menolak dan ada yang menerima hal itu sah – sah saja dalam negara yang menganut sistem demokrasi seperti di Indonesia. Mereka yang menolak adalah mereka yang menganggap bahwa Otsus Papua dan Papua Barat ada pencapaian dalam pembanguana infrastruktur dan afirmasi. Mereka yang menerima otsus adalah mereka yang rata – rata kelas menengah ke atas ( elit lokal ) karena mereka juga bagian dari penyalur dana otsus bahkan mereka juga penikmat dari dana otsus tersebut, sedangkan mereka yang menolak adalah mereka yang notabnya kelas menengah kebawah yang tidak merasakan secara langsung dampak dari penerapan Otonomi khusus di Provinsi</p>

		<p>Sebagai perempuan Papua bagaimana Ibu melihat respon dari mereka yang tolak dan mereka yang terima?</p> <p>2. Sebagai perempuan Papua dan juga sebagai ibu dari anak – anak, bagaimana Ibu melihat dampak Otonomi khusus bagi Orang Asli Papua dalam pemberdayaan masyarakat melalui pasar wosi, pasar sanggeng dan pasar</p>	<p>Papua Barat.</p> <p>2. Salah satu faktor yang menyebabkan kelas menengah kebawa menolak Otonomi Khusus di perpanjang adalah gagalnya otsus dalam mengangkat hartkat dan martabat orang asli Papua khususnya di Kabupaten Manokwari, bukan hanya kabupaten Manokwari namun di kota – kota lain seperti ( Sorong, Jayapura, Timika, Nabire, Biak dan kota – kota lainnya ). Mereka melihat bahwa selama ini tanah Papua memiliki sumber daya alam yang melimpah namun kenapa masyarakat Papua tidak menikanti hasil dari sumber daya alam tersebut. Yang kedua mengenai pasar, Pemerintah Kabupaten Manokwari kurang memperhatikan sarana dan prasarana</p>
--	--	--	--

		<p>Borobudur?</p> <p>3. Selama Ibu menjadi kepala Dinas pemberdayaan perempuan Kabupaten Manokwari era kepemimpinan DRs Bastian Salabai Sth. Apa saja yang Ibu</p>	<p>penunjang. Pemerintah Manokwari lebih fokus pada pembanguna infrastruktur ( pembangunan Fisik ) sedangkan pembangunan orang asli Papua kurang di perhatikan. Di sisi yang lain, pemerintah daerah juga kurang memberikan edukasi kepada mama – mama di pasar melalui pelatihan, atau studi banding ke pasar – pasar tradisinal yang ada di luar Papua sehingga mama – mama kita juga mendapatkan pengetahuan yang baru tentang tata kelolah pasar lapak dengan baik sehingga menarik perhatian dari pembeli.</p> <p>3. Selama ibu menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Manokwari 2010 – 2014, ada beberapa hal yang ibu lakukan yaitu orang – orang atau perempuan yang sudah memiliki pengalaman kerja dan jenjang karir yang sudah cukup, ibu promosikan sebagai kepala seksi bahkan ada yang di promosikan sebagai kepala bidang di Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Manokwari. Setelah saya turun dari jabatan Kepala Dinas, ibu juga menjadi aktivis</p>
--	--	--	---

		<p>sudah lakukan dalam mengangkat harkat dan martabat perempuan Papua di Kabupaten Manokwari?</p>	<p>perempuan yang memperjuangkan hak – hak perempuan Papua dalam lembaga legislti salah satunya adalah Ibu Dorkas Meidodga unuk menjadi anggota Legislatif, bagi Ibu untuk berbicara soal perempuan Papua khususnya seperti Pasar Wosi, Pasar Sanggeng dan Pasar Borobudur, harus di perjuangkan melalu lembaga legislatif, kaena mereka yang memiliki kewenangan untuk menyetujui anggaran, dan mereka juga memiliki kewenangan untuk mengwasi pemerintah daerah dalam mengelolah keuangan.</p>
3	<p>Abner Singgir ( Kepala Biro Otsus Setda Provinsi Papua Barat</p>	<p>1. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai dampak Otonomi Khusus selama ini setelah terjadi perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 dengan di</p>	<p>1. Otsus yang di berikan kepada Papua Barat dengan UU No.35 Tahun 2008 merupakan suatu syarat konstitusional yang harus di lakukan oleh pemerintah pusat, karena secara administratif pemerintah Papua Barat sudah memiliki wilayah administratif sendiri sejak 2022, satu tahun setelah Undang – Undang Otsus di berikan kepada Papua dan Papua Barat. Karena Papua Barat saat itu masih menjadi provinsi yang sifatnya karateker, sehingga tahun 2004 barulah</p>

		<p>terbitkannya UU Nomor 35 Tahun 2008?</p> <p>2. Bagaimana peran pemerintah Provinsi Papua Barat dalam menjalankan amanat UU No.35 Thn 2008 dalam hal pemberdayaan masyarakat asli Papua di Provinsi Papua Barat?</p>	<p>kemudian provinsi Papua Barat statusnya menjadi definitif. Namun Otsus di berikan kepada Papua Barat pada tahun 2008 sehingga secara infrastruktur Provinsi Papua lebih maju dari pada Provinsi Papua Barat karena dana otsus pada saat itu masih bergantung pada provinsi Papua.</p> <p>2. Selama kepemimpinan Drs Dominggus Mandacan, ada satu produk regulasi yang di terbitkan oleh pemerintah provinsi Papua Barat yaitu Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pelaksanaan dan pembagian dana Otsus provinsi Papua Barat. Pemabagian bertujuan untuk memisahkan program pemerintah yang menggunakan dana otsus untuk hal – hal yang di amankan oleh Undang – Undang Otsus seperti ( Pendidikan, Kesehatan, perekonomian orang asli Papua dan pemberdayaan masyarakat asli Papua melalui pelatihan dan bimtek</p>
--	--	--	---

		<p>3. Banyak kalangan masyarakat Papua yang melihat bahwa Otonomi khusus telah gagal dalam mengangkat harkat dan martabat masyarakat Papua di Provinsi Papua barat terkhususnya di Manokwari. Apa saja faktor yang menyebabkan hal itu terjadi?</p> <p>4. Untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat asli</p>	<p>3. Ada beberapa penyebab yaitu :</p> <p>a. Otsus baru berlaku di Papua Barat sejak 2012 hal itu di lihat dari di bentuknya Majelis Rakyat Papua Barat.</p> <p>b. Kurang ada kerja sama antara instansi pemerintah yang mengelolah dana otsus dengan Majelis Rakyat Papua Barat</p> <p>c. Masih sangat minim regulasi yang di hasilkan oleh pemerintah dan DPRP mengenai keberpihakan Otsus kepada OAP</p> <p>d. Dana Otsus yang di kelolah pemerintah Provinsi hanya 10% dari tota dan Otsus 90% di kelolah oleh pemerintah Kabupaten/Kota melalui transfer.</p> <p>4. Kondisi yang terjadi di beberapa pasar di pusat jantung ibu kota Manokwairi sangat di sayangkan, seperti infrastruktur yang kurang memadai, daya tampung yang sangat tidak cukup apalagi setiap tahun populasi penduduk</p>
--	--	--	---

		<p>Papua adalah melalui pasar. Bagaimana Bapak melihat kondisi beberapa pasar yang ada di Kabupaten Manokwari</p>	<p>semakin meningkat, kedatangan pendatang di Manokwari justru membuat daya tampung di beberapa pasar tidak cukup, baik menampung pembeli maupun pedagang. Hal itu yang menyebabkan sehingga mama – mama Papua harus menjual di pinggir jalan dengan beralaskan karung dan kain, munculnya bangunan – bangunan liar di sepanjang jalan menuju pasar wosi dan pasar sanggeng bahkan di sepanjang jalan raya di kota Manokwari. Selain itu, harus ada pembagian tempat dagang yang jelas dengan pendataan jumlah pedagang di beberapa pasar di di Manokwari agar tidak ada pihak lain yang di korbakan.</p>
4	<p>Ibu Rosita Watofa ( kepala Dinas Perindakop dan UMKM Kabupaten Manokwari</p>	<p>1. Bagaimana Ibu Melihat Dampak Otonomi Khusus bagi Orang Asli Papua di Kabupaten Manokwari</p>	<p>1. Pertama yang sudah di lakukan oleh pemerintah kabupaten Manokwari dalam tata kelolah bebrapa pasar di Kabupaten Manokwari adalah penertiban terhadap beberapa pedagang yang berjualan di lahan milik pemerintah daerah terutama yang mendirikan bangunan – bangunan liar semi permanen. Semua itu di lakukan guna</p>

		<p>khususnya melalui perdagangan di Kabupaten Manokwari</p> <p>2. Bagaimana</p>	<p>pendataan. Hal itu dilakukan karena mengingat manokwari merupakan wajah dari Ibu kota Provinsi Papua Barat, selain itu Manokwari juga memiliki sejarah yang panjang tentang hubungan sosial antara warga pendatang terjadi akibat proses perdagangan artinya Manokwari bukan hanya sebagai ibu kota Provinsi melainkan juga kota beradaban bagi orang asli Papua di tanah Papua. <i>Kedua</i>, tata kelola lapak untuk membantu pedagang di beberapa pasar di Kabupaten Manokwari harus dilakukan dan ditertibkan agar pasar – pasar di Kota Manokwari bisa tertata dengan baik dan rapi. Seperti pasar yang dikhususkan untuk Mama – mama Papua harus ditata dengan baik sehingga pemerintah daerah bisa memisahkan pasar yang menjual sayur mayur dipisahkan dari pasar yang menjual hasil kerajinan tangan dari mama – mama Papua. Oleh karena itu berharap pedagang – pedagang di beberapa pasar di Kabupaten Manokwari harus siap untuk diatur kerja sama.</p> <p>2. Perlu adanya kerja sama antara semua</p>
--	--	---	---

		<p>dengan fasilitas pasar Wosi dan beberapa pasar lain di Kabupaten Manokwari yang kurang memadai seperti los – los yang rusak dan sampah – sampah yang berhamburan?</p> <p>3. Sebagai orang Papua, sebagai ibu dan perempuan Papua dan juga sebagai orang yang membidangi bidang yang berhubungan langsung dengan Usaha Makro Menengah</p>	<p>stakeholder baik pemerintah, pedagang dan juga pengunjung untuk sama – sama menjaga dan merawat fasilitas pasar yang sudah di bangun oleh pemerintah daerah Kabupaten Manokwari. Selama ini yang terjadi adalah ada yang membuang sampah bukan pada tempatnya, mama – mama setelah jualan sampah – sampah di biarkan begitu saja tanpa menyimpan sampah – sampah dari hasil jualan untuk kemudian di buang di tempat sampah yang sudah di siapkan oleh pemerintah.</p> <p>3. Kalau di pasar Wosi sudah pernah di lakukan oleh Bupati Paulus Demas Mandacan S.Ip. hal yang di lakukan adalah melakukan pendataan terhadap hasil dagang yang di jual belikan oleh setiap pedagang dan pengunjung yang ada pasar wosi, ternyata pasar wosi tidak hanya menampung pedagang yang menjual hasil kebun, hasil melaut dan perlengkapan dapur lainnya namum pasar wosi juga menyajikan hasil kerajinan tangan mama – mama Papua seperti Noken, Kalung, gelang tangan, dan hal – hal lain dengan nuansa kepapuaan.</p>
--	--	---	---

		<p>Kebawah dan perindustrian dan perdagangan Kabupaen Manokwari apa saja kebijakan yang sudah di lakukan untuk mengakomodir hasil – hasil kebun mama – mama Papua yang berjualan di pasar dengan menggunakan alas seadanya seperti Karung dan kain?</p> <p>4. Langkah apa yang akan di lakukan untuk</p>	<p>Oleh karena itu, kebijakan Bupati Manokwari sebelumnya membangun pasar khusus mama – mama Papua di samping dan di bekang pasar wosi kabupaten Manokwari. Namun hal yang membuat hingga pasar khusus mama – mama Papua tidak beroperasi dengan baik adalah ada anggapan yang muncul bahwa tempat yang di sediakan oleh pemerintah kurang produktif untuk di kunjungi pembeli. Sehingga lapak – lapak yang sudah di bangun oleh pemerinah daerah Kabupaten Manokwari tidak di urus dan cenderung di abaikan oleh pemilik lapak unuk mencari tempat yang bisa di jangkau oleh pengunjung. Oleh karena itu, untuk menjangkau pembeli dan pengunjung adalah dengan cara berjualan di pinggir jalan denga beralaskan karung dan kain atau denan peralatan apa adanya, karena bagi mereka hal itu bisa di jangkau oleh pengunjung dan bisa memperoleh pendapatan yang cukup maksimal.</p> <p>4. Yang akan di lakukan oleh pemerintah kabupaten Manokwari melalui Dinas</p>
--	--	--	--

		<p>mengatiskan kembali pasar yang di khususkan untuk mama – mama Papua di Pasar Wosi?</p>	<p>UMKM dan Perindakop Kabupaten Manokwari adalah akan melakukan pendataan ulang terhadap mama – mama yang masih berjualan di pinggir jalan dan di emperan toko serta mama – mama yang tidak memilik lapak. Pendataan yang di lakukan guna mengetahui jenis – jenis barang yang di jual guna menempatkan mama – mama sesuai dengan daya tampung dari pasar Wosi dan beberapa pasar tradisoonal yang ada di Kabupaten Manokwari. Selain itu, pasar mama – mama Papua di Pasar wosi akan di bangun dan ti tata kembali, kemudian jalan jalan di sepanjang pasar wosi ( depan, kiri, kanan dan belakang ) pasar wosi akan di tata kembali untuk menunjang aktivitas jual beli di pasar wosi Kabupaten Manokwari.</p>
5	<p>Ibu Yanti ( Pedagang pendatang di Pasar Wosi )</p>	<p>1. Apakah Ibu merasa nyaman berjualan di Pasar Wosi?</p> <p>2. Bagaiman Ibu</p>	<p>1. Kalau merasa nyaman tidak, karena kalau hujan sepanjang jalan ini penuh dengan lumpur sehingga kadang sepih pembeli, tapi kalau tidak hujan alhamdulillah rezeki lancar karena rame denga pembeli.</p> <p>2. Berharap pemerintah Manokwari bisa</p>

		<p>melihat kondisi bangunan di pasar Wosi?</p>	<p>memperhatikan bangunan – bangunan di pasar Wosi, karena menurut Ibu banyak fasilitas yang belum di siapkan oleh pemerintah yaitu penyediaan bak sampah, penyediaan toliet umum dan parkir yang sembrautan.</p>
		<p>3. Bagaimana hubungan komunikasi Ibu dengan mama – mama Papua di Pasar Wosi ?</p>	<p>3. Alhamdulillah hubungan ibu dengan mama – mama Papua di Pasar Wosi baik – baik saja, kadang kami saling membantu dalam menjaga hasil jualan dari masing – masing kami terutama ketika Ibu pergi jemput anak di sekolah atau ketika ada pembeli yang mau beli hasil jualan milik mama – mama Papua namun ketika yang di maksud oleh pembeli tidak di sediakan oleh mama – mama Papua, mereka akan sarnkan untuk beli di ibu karena memang kita berdekatan.</p>
		<p>4. Sebagai warga pendatang di Kabupaten Manokwari, bagaimana Ibu melihat mama –</p>	<p>4. Ibu berharap ada perhatian yang khusus dari Bupati dan Gubernur agar meperbaiki los – los di dalam yang di biarkan, agar mama – mama Papua bisa berjualan di tempat yang layak, kasihan yang jadi pejabat di Manokwari orang – orang Papua tapi</p>

		<p>mama Papua yang masih berjualan dengan beralaskan karung dan kain di pinggir jalan, ataupun di dalam lingkungan pasar tapi masih beralaskan karung?</p>	<p>mereka tidak punya hati untuk mama – mama Papua yang berjualan di tempat yang layak. Harapan ibu semoga pasar Wosi bisa di rehab untuk diperbesar lagi agar semua masyarakat yang berjualan dengan peralatan apa adanya bisa berjualan dengan rasa nyaman dan terhindar dari Hujan dan debu jalanan.</p>
6	<p>Ibu Suni ( Pedagan Pendatang di Pasar Wosi )</p>	<p>1. Bagaimana Ibu bisa mendapatkan lapak dagang di pasar Wosi?</p> <p>2. Bagaimana</p>	<p>1. Saya melanjutkan usaha di lapak ini dari orang tua yang sudah duluan berjualan di sini semenjak saya belum berkeluarga hingga sekarang anak saya sudah tiga. Anak yang pertama sudah kelas 2 SMK Negeri 2 Manokwari. Kebetulan orang tua saya sudah memiliki usaha yang lain yaitu membuat bangunan permanen untuk menjual berbagai peralatan dan bumbu – bumbu dapur di samping rumah.</p> <p>2. Bangunan di pasar wosi ini cukup baik,</p>

		<p>tanggapan ibu tenang bangunan dan fasilitas yang ada di pasar Wosi ini?</p> <p>3. Bagaimana tanggapan Ibu tentang Mama – Mama Papua yang berjualan dengan karung dan kain di pasar wosi?</p>	<p>namun di beberapa tempat yang kurang di rawat di perhatikan oleh pemerintah yaitu bangunan yang rusak sehingga hujan gampang masuk ke dalam los – los, jalan sekitar pasar ini yang rusak, bak sampah yang hanya ada di beberapa titik, dan banyak lapak yang diabaikan oleh pemilik, mau kita tempati tapi takut di usir oleh pemilik</p> <p>3. Saya juga kurang mengerti, padahal di dalam sana ada banyak tempat – tempat yang kosong, namun mereka masih mau memilih berjualan di dengan karung dan kain. Mungkin mereka lebih banyak meraup keuntungan dengan cara berjualan dengan karung atau kain. Tapi berharap mereka bisa mendapatkan tempat yang layak untuk sama – sama berjualan di pasar ini ( Wosi )</p>
6	<p>Orgenes Wonggor A.,Md ( Ketua DPRD Provinsi Papua Barat )</p>	<p>1. Bagaimana DPRD Papua Barat melihat Otonomi Khusus Papua Barat</p>	<p>1. Otonomi Khusus bagi Papua Barat melalui perubahan terhadap UU No.21 Tahun 2001 merupakan syarat konstitusi untuk segera harus di lakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah termasuk di dalam lembaga eksekutif dan Legislatif. Bagaimanapun alasannya Otonomi Khusus</p>

		<p>2. Selama 10 Tahun otonomi khusus di Papua Barat di lakukan, apakah sudah ada hasil yang berdampak positif bagi orang asli Papua di Kabupaten Manokwari?</p>	<p>bagi Provinsi Papua dan Papua Barat harus di lanjutkan guna proses pembangunan di provinsi Papua Barat. Walaupun banyak pihak yang menilai otonomi khusus telah gagal dalam pengangkatan harkat dan martabat orang asli Papua di Provinsi Papua Barat, namun perlu di sadari bahwa otonomi khusus di Papua Baru berjalan efektif di tahun 2014. Hingga sekarang otonomi khusus di Papua Barat baru berjalan 10 tahun artinya otsus di Papua Barat masih tergolong sebagai sesuatu yang baru di Papua Barat.</p> <p>2. Hingga saat ini yang masih di sayangkan adalah pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten kota masih kurang peka dalam melihat kondisi yang ada di setiap daerah kabupaten/kota terkhususnya sektor pendidikan, kesehatan dan perekonomian, berharap pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota bisa memiliki komitmen dalam menjalankan amanat undang – undang otonomi khusus.</p>
--	--	---	---

		<p>3. Hingga saat ini berapa perdasus dan perdasi yang sudah di hasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Papua Barat?</p> <p>4. Bagaimana peran DPRD untuk membangun kerja sama dengan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/kota dalam menjalankan amanat Undang</p>	<p>3. Baru – baru ini yang di lakukan oleh DPRD bersama Pemerintah Provinsi dan Majelis Rakyat Papua dalam merumuskan peraturan daerah Provinsi dan Peraturan daerah khusus adalah sebanyak 21 Rancangan perturan daerah provinsi dan Peraturan daerah khusus yang terdiri dari 8 Raperdasus dan 13 Raperdasi di antaranya adalah tentang hak orang asli Papua yaitu pertambahan rakyat dan pemberdayaan perempuan Papua.</p> <p>4. Yang bisa di lakukan oleh DPRD Provinsi adalah menggunakan wewenang yang di berikan oleh undang – undang yaitu nelakukan pengawasan terhadap kinerja pemerinah daerah Provinsi dalam melaksanakan amant undang – undang otsus Papua barat, terkhususnya dalam pembangunan fasilitas – fasilitas publik yang di rasakan secara langsung dampaknya terhadap oranag asli Papua seperti Sekolah, puskesmas atau pasar – pasar yang ada di Kabupaten Manokwari dan beberapa kabupaten lainnya yang masuk dalam</p>
--	--	---	---

		<p>– Undang Otsus selain fungsi Legislasi</p>	<p>wilayah kerja provinsi Papua Barat.</p>
--	--	---	--

**Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian**



**Gambar 1.** Aktifitas pedagang pendatang di lapak basah pasar Wosi ( *Sumber : Kementerian perdagangan* )



**Gambar 2 .** Rencana Pembangunan Pasar Wosi ( *Sumber : Pemda Manokwari* )



**Gambar 3 :** Aktifitas pedagang pendatang di Pasar Wosi (*Sumber : Media Papua Kita*)



**Gambar 4 :** Penertiba pemerintah daerah Kabupaten Manokwari terhadap bangunan – bangunan liar di Pasar Wosi ( *Sumber Link Papua* )



**Gambar 5 :** Ibu Welmince Pedagang asli Papua yang menjual hasil buminya di pasar Wosi dengan beralaskan karung dan kain.



**Gambar 6:** Ibu Tuniwa, salah satu pedagang bahan poko di Pasar Wosi asala Sulawesi.

# Skripsi Abia

## ORIGINALITY REPORT

**23%**  
SIMILARITY INDEX

**23%**  
INTERNET SOURCES

**3%**  
PUBLICATIONS

**6%**  
STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	3%
2	<a href="http://jurnal.ugm.ac.id">jurnal.ugm.ac.id</a> Internet Source	3%
3	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://antropologiudayana.blogspot.com">antropologiudayana.blogspot.com</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://text-id.123dok.com">text-id.123dok.com</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://www.kompasiana.com">www.kompasiana.com</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://digilib.uinsby.ac.id">digilib.uinsby.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://feisalarif.blogspot.com">feisalarif.blogspot.com</a> Internet Source	1%